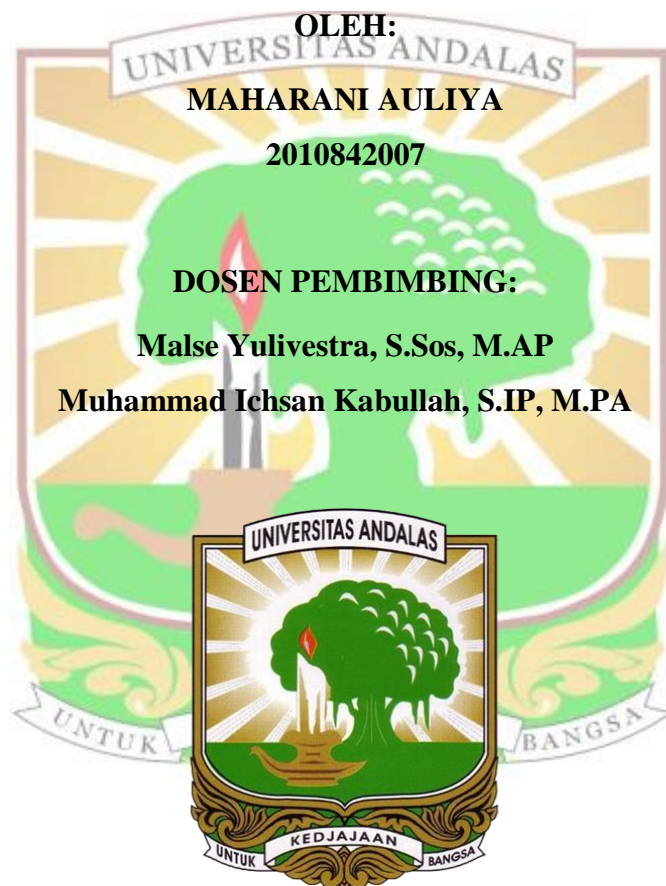


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN NAGARI PERSIAPAN PADA
PEMEKARAN NAGARI KAMANG MUDIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Administrasi Publik Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

ABSTRAK

Maharani Auliya, NIM 2010842007, Implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Nagari Persiapan Pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024. Dibimbing oleh: Muhammad Ihsan Kabullah, S. IP., M. PA dan Malse Yulivestra, S. Sos., M. AP. Skripsi ini terdiri dari 162 halaman dengan 8 buku teori, 3 buku metode penelitian, 2 Skripsi, 7 artikel jurnal, 5 peraturan perundang-undangan, 4 dokumen, dan 3 sumber internet.

Nagari Kamang Mudiak merupakan salah satu nagari yang melakukan pemekaran di Kabupaten Agam. Keputusan dalam memekarkan nagari merupakan keinginan masyarakat agar pelayanan dan pembangunan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi banyak problema sehingga berdampak kepada sosial masyarakat karena adanya perbedaan perspektif dan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat terutama dalam hal penetapan batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam penyelenggaraan nagari persiapan pada proses pemekaran Nagari Kamang Mudiak dengan perspektif evaluasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan triangulasi sumber. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino dengan lima variabel, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, dan regulasi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Pada variabel sumber daya aparatur perangkat nagari persiapan yang dipilih pada umumnya tidak berasal dari keilmuan tentang pemerintahan, walaupun begitu penetapannya merujuk kepada kebijakan. Koordinasi dan kolaborasi terdapat miss pemahaman terhadap alur koordinasi yang membuat adanya prasangka yang muncul serta komunikasi publik yang kurang massive dilakukan sehingga timbulnya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat. Pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan nagari persiapan sudah cukup memadai dengan adanya swadaya dari masyarakat. Namun terkait penetapan asset belum diselesaikan secara menyeluruh. Selanjutnya daya dukung keuangan yang berasal dari APB nagari induk pada realisasinya belum maksimal. Selain itu terdapat perbedaan cara pandang terhadap pemahaman akan regulasi antar pelaksana kebijakan terutama pada penetapan asset.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, pemekaran nagari, penyelenggaraan nagari persiapan, Nagari Kamang Mudiak

ABSTRACT

Maharani Auliya, NIM 2010842007, Implementation of Agam Regent Regulation number 48 of 2017 on the organization of preparation nagari in the expansion of Nagari Kamang Mudiak. Department of Publik Administration, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2024. Supervised by: Muhammad Ichsan Kabullah, S. IP., M. PA dan Malse Yulivestra, S. Sos., M. AP. This thesis comprises 162 pages using references from 8 theoretical books, 3 method books, 7 journal articles, 2 theses, 4 documents, 5 laws, and 3 internet website.

Nagari Kamang Mudiak is one of the nagari that is expanding in Agam Regency. The decision to expand the nagari is the desire of the community so that services and development can be better so that it can improve community welfare. However, in its implementation, it faces many problems that have an impact on social society because of differences in perspective and point of view between the government and the community, especially in terms of determining boundaries. The research aims to determine how the implementation of nagari preparation in the process of expanding Nagari Kamang Mudiak is carried out with a policy evaluation perspective. This research use a qualitative research approach using descriptive method. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The selection of research informants used purposive sampling techniques, with source triangulation. Analysis of the research findings was carried out using the policy evaluation theory by Leo Agustino with five variables, namely apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations.

The results of the research illustrate that the implementation of Agam Regent Regulation Number 48 of 2017 on the organization of priparation nagari in the expansion of Nagari Kamang Mudiak has not been carried out optimally because there are several challenges encountered during implementation. In the variable of apparatus preparation resources, the selected village apparatus generally does not come from knowledge about government, even though its determination refers to policy. Coordination and collaboration there is a misunderstanding of the coordination flow which creates prejudices that arise and public communication that is not massive enough to cause differences in perspective between the government and the community. In terms of the availability of facilities and infrastructure in the implementation of the village preparation is quite adequate with the existence of self-reliance from the community. However, regarding the determination of assets, it has not been completed in its entirety. Furthermore, the financial support from the APB of the parent village in its realization has not been maximized. In addition, there are differences in perspectives on understanding regulations among policy implementers, especially in determining assets.

Keywords: *Policy Implementation, nagari expansion, the organization of preparation nagari, Nagari Kamang Mudiak*